

## ABSTRAK

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang melanggar norma hukum di dalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas. Terdapat bentuk perbuatan melawan hukum yang acapkali dilakukan dalam pengadaan tanah, yakni tindakan mark-up atas besaran ganti kerugian baik yang dilakukan dengan didasarkan hasil penilaian oleh Penilai atau tidak dilakukan penilaian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak-pihak yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah : Instansi yang memerlukan tanah karena proses pengadaan tanah dimulai dari pengajuannya; Penilai karena secara legalitas dibebani tanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian atas besaran ganti kerugian yang akan ditetapkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak atau pemilik tanah objek pengadaan; dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah karena secara tanggung jawab memiliki pengetahuan secara jelas terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk memberi saran dan pendapat atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Katakunci : undang-undang, sanksi pidana, dan perbuatan melawan hukum.

## ABSTRACT

*Inside the Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest is not set on the criminal provisions or acts that can be categorized as unlawful, so in case of an unlawful act or any other act in violation of the rule of law in which there are expressly sanctions. There are forms of tort is often done in the land acquisition, which measures the amount of mark-up over whether compensation was based on the assessment made by the Assessor or no assessment. In the event of an unlawful act in the procurement of land for development in the public interest, then the parties who have the ability to be responsible are: Agencies that require land because the land acquisition process begins for the proposal; Assessors legality because it is charged with the implementation of the assessment of the magnitude of Gati losses to be set to be given to the party entitled or landowners object of procurement; and Chief Executive of the Land Acquisition responsibility because it clearly has the knowledge of the entire implementation of land acquisition. The legal research legislative approach and the conceptual approach. The results of this study is to give advice and opinions to Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development in the Public Interest.*

*Keywords: law, criminal sanctions, and criminal activities*